

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan kepala SKPD dan rancangan RKPD tersebut akan menjadi bahan Musrembang RKPD.

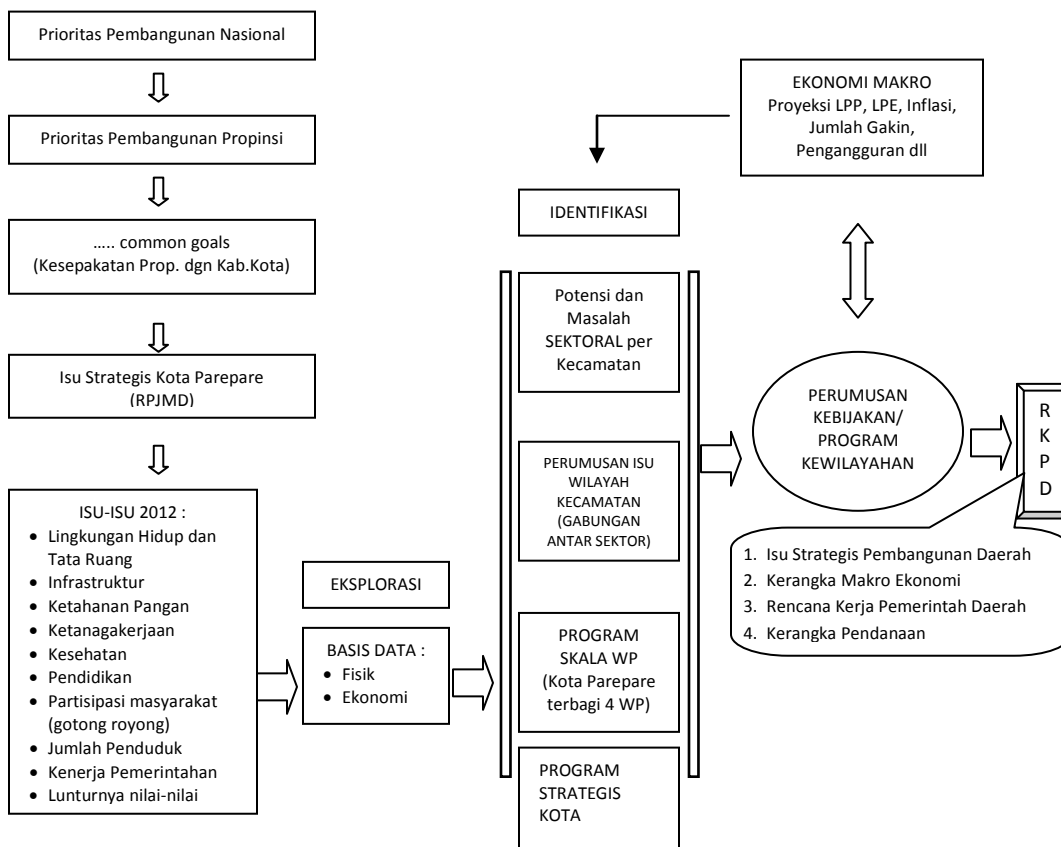
RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan program yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

RKPD Kota Parepare Tahun 2012 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2012

1.1.1 Proses.....

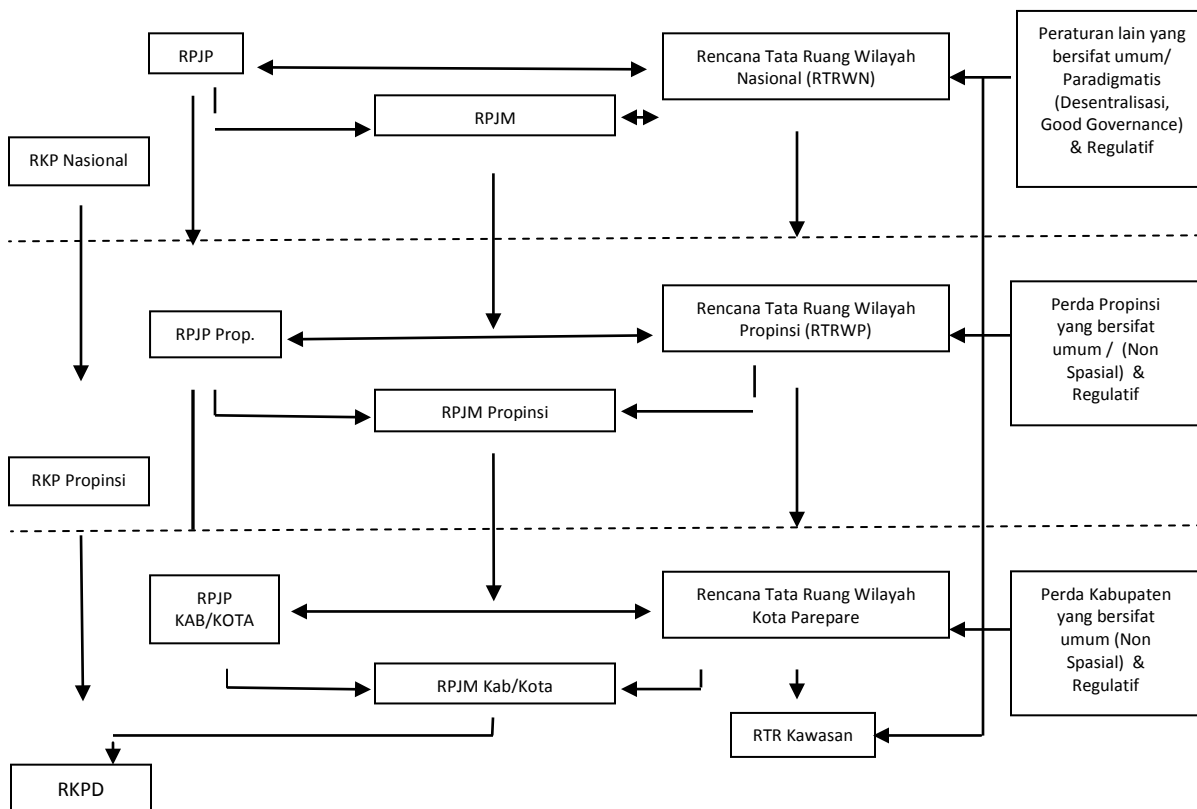
1.1.1 Proses Penyusunan RKPD

Proses Penyusunan RKPD secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



1.1.2 Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan Lainnya

Kedudukan RKPD diantara dokumen perencanaan lainnya secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



1.2 Dasar Hukum

1.2 Dasar Hukum

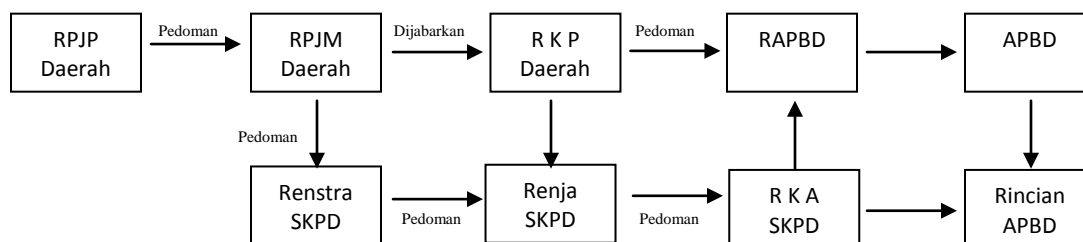
Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.13)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya secara lebih jelas pada gambar berikut :



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan RKPD di dahului dengan rancangan draft RKPD Kota Parepare yang tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan perubahan lingkungan strategis dengan tetap memperhatikan kesesuaian sumber daya yang tersedia. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012, diselenggarakan melalui proses kegiatan yang konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh stakeholder melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, dan kota).

RKPD disempurnakan melalui masukan-masukan dari hasil forum musyawarah SKPD dan Para Delegasi Masyarakat serta di kaji lebih lanjut oleh Tim Penyusun RKPD Kota Parepare yang selanjutnya dirumuskan kembali menjadi RKPD Final yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota Parepare.

Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2012 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD dan Maksud dan Tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU:

memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH : memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH :

memuat tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH :

memuat tentang Perencanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, Lokasi, dan SKPD Penanggung Jawab.

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan usulan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RKPD akan memuat beberapa pembahasan antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan, Program dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD yaitu untuk mencapai keterpaduan perencanaan tahunan daerah secara efisien dan efektif serta untuk mempertajam prioritas pembangunan berdasarkan isu strategis dan masalah mendesak daerah saat ini, juga sebagai acuan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2012.

BAB II

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara $3^{\circ} 57' 39''$ - $4^{\circ} 04' 49''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 36' 24''$ - $119^{\circ} 43' 40''$ Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT).

Luas wilayah Kota Parepare adalah $\pm 99,33 \text{ Km}^2$, Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang.

Kondisi iklim dan cuaca Kota Parepare berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi menunjukkan tipe iklim C2 (Schmidt-Ferguson) yaitu jumlah bulan basah 5 - 6 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut menempati wilayah bagian barat sampai pesisir pantai seluas $\pm 60\%$ dari luas Kota Parepare. Tipe iklim D2 (Oldeman) yaitu jumlah bulan basah 3 - 4 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Zona iklim tersebut menempati wilayah bagian timur Kota Parepare seluas kurang 40% dari luas wilayah Kota Parepare. Curah hujan tertinggi adalah 556 mm/tahun dan yang terendah menunjukkan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki.

Rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar $28,5^{\circ}\text{C}$ dengan suhu minimum $25,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum $31,5^{\circ}\text{C}$, rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5 - 5,8 m/detik yang bertiup dari arah barat ke timur selama bulan November sampai April. Kota Parepare mempunyai dua jenis musim yaitu musim hujan umumnya terjadi pada bulan November - April dan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei - Oktober setiap tahunnya, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan Susenas tahun 2009, proyeksi penduduk kota Parepare Tahun 2009 berjumlah 118.842 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu Kecamatan Bacukiki dengan 14.068 jiwa. Bacukiki Barat 37.036 jiwa, Ujung 29.593 dan Kec. Soreang 38.145 jiwa.

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tiap Kecamatan di Kota Parepare Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Bacukiki	66,70	4	14.068	211
2.	Bacukiki Barat	13,00	6	37.036	2.849
3.	Ujung	11,30	5	29.593	2.619
4.	Soreang	8,33	7	38.145	4.579
Jumlah		99,33	22	118.842	1.196

Sumber : BPS Kota Parepare

Tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare sebesar 1.196 jiwa /Km² jauh diatas tingkat kepadatan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 173 jiwa/Km². Kecamatan Soreang merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan 4.579/Km² berbanding terbalik Kecamatan Bacukiki dengan tingkat kepadatan terendah sebesar 211 jiwa / Km².

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Keadaan Tahun 2005 – 2009)

No	Kecamatan	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Bacukiki	43.996	44.225	48.369	13.857	14.068
2.	Bacukiki Barat	----	----	----	36.482	37.036
3.	Ujung	29.411	29.584	29.681	29.150	29.593
4.	Soreang	41.118	41.360	38.259	37.574	38.145
Kota Parepare		114.495	115.199	116.309	117.063	118.842

Sumber : BPS Kota Parepare

Peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare dalam waktu 5 tahun (2005 – 2009) sebesar 4.347 jiwa atau rata-rata per tahun mengalami peningkatan 870 jiwa dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 1.779 jiwa.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	5.696	5.824	11.520
2	5 - 9	6.757	5.548	12.305
3	10 - 14	5.764	6.266	12.030
4	15 - 19	5.367	5.596	10.963
5	20 - 24	4.530	5.433	9.963
6	25 – 29	5.349	6.087	11.436

7	30 – 34	4.392	4.694	9.086
8	35 – 39	3.763	4.826	8.590
9	40 - 44	3.831	3.696	7.527
10	45 - 49	3.202	3.436	6.638
11	50 - 54	2.837	2.937	5.774
12	55 - 59	1.387	2.053	3.440
13	60 – 64	1.820	1.756	3.576
14	65+	2.340	3.654	5.994
Jumlah		57.035	61.807	118.842
<i>Sumber : BPS Kota Parepare</i>				

Struktur umum penduduk Kota Parepare dapat menggambarkan tingkat produktifitas penduduk Kota Parepare. Usia produktif berkisar antara 15 – 64 tahun, dimana diharapkan penduduk pada usia ini memiliki kemampuan untuk berusaha/melakukan pekerjaannya secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam memproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan.

Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Parepare tahun 2005 s.d tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB ADH Konstan	Pertumbuhan (%)
2005	786.090,78	15,74	532.393,09	6,08
2006	891.489,11	13,41	569.455,48	6,96

2007	1.063.435,37	19,29	609.224,94	6,98
2008	1.298.778,61	22,13	655.255,15	7,56
2009	1.519.156,10	16,97	707.234,85	7,93
2010*)	1.796.670,56	18,27	767.162,91	8,47
Rata-rata		21,16		8,79
Sumber : BPS Kota Parepare			*) Angka Sementara	

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembangunan ekonomi Kota Parepare semakin menunjukkan peningkatan,. Dilihat dari besarnya laju perkembangan dan pertumbuhan, selama kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2010), kondisi ekonomi terbaik pada tahun 2009 dengan pertumbuhan diatas 7%. Hal ini didukung oleh membaiknya sektor-sektor ekonomi di Kota Parepare. Secara riil PDRB berdasarkan harga berlaku untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada *tabel* berikut :

Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2006 – 2010 (Juta Rp)

Lapangan Usaha		2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Pertanian	70.229,03	79.714,44	93.229,80	107.242,19	120.160,60
2	Pertambangan dan penggalian	2.907,00	3.446,64	4.368,65	4.722,87	5.157,44
3	Industri pengolahan	27.339,27	30.631,76	34.175,33	37.241,68	40.814,95
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	13.223,97	14.991,50	18.221,91	20.715,07	24.084,06
5	Konstruksi	81.090,35	97.334,20	114.086,07	128.422,27	146.975,52
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	246.719,41	298.257,85	361.881,47	406.075,01	450.358,45
7	Pengangkutan dan Komunikasi	218.563,47	250.095,68	292.341,35	321.493,73	365.748,64
8	Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	105.833,82	133.587,03	160.321,75	201.031,87	266.652,39
9	Jasa-jasa lainnya	125.582,78	155.376,27	220.152,28	291.211,41	376.718,49
Total PDRB		786.090,78	891.489,11	1.063.435,37	1.298.778,61	1.796.670,56
Sumber : BPS Kota Parepare			*) Angka Sementara			

Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2006 – 2010 (Juta Rp)

Lapangan Usaha		2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Pertanian	46.086,76	48.197,06	51.185,76	55.074,72	54.764,82
2	Pertambangan dan penggalian	1.817,34	1.879,42	2.064,81	2.155,95	2.277,01
3	Industri pengolahan	17.815,05	18.342,20	19.214,46	20.078,18	20.607,28
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.949,87	8.370,87	9.540,92	10.185,56	11.125,57
5	Konstruksi	48.158,67	52.143,32	55.548,28	58.969,33	64.621,46
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	165.829,60	177.816,03	193.250,01	204.544,36	217.743,12
7	Pengangkutan dan Komunikasi	137.001,43	144.726,19	154.484,50	163.957,44	174.473,43
8	Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	68.695,37	78.096,70	84.639,19	99.914,84	124.473,43
9	Jasa-jasa lainnya	76.101,42	79.653,15	85.327,23	92.354,47	96.801,62
Total PDRB		569.455,48	609.224,94	655.255,15	707.234,86	767.162,91
Sumber : BPS Kota Parepare			*) Angka Sementara			

Untuk Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Tahun 2005 – 2010, sektor perdagangan, hotel dan restaurant memberi kontribusi rata-rata sebesar 29,31% diikuti sektor angkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.7 Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 - 2009

Lapangan Usaha		2006	2007	2008	2009	2010*)	Rata-rata
1	Pertanian	8,09	7,91	7,81	7,79	7,14	7,75
2	Pertambangan dan penggalian	0,32	0,31	0,32	0,30	0,30	0,31
3	Industri pengolahan	3,13	3,01	2,93	2,84	2,69	2,92
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,40	1,37	1,46	1,44	1,45	1,42
5	Konstruksi	8,46	8,56	8,48	8,34	8,42	8,45
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	29,12	29,19	29,49	28,92	28,38	29,02
7	Pengangkutan dan Komunikasi	24,06	23,76	23,18	23,28	22,74	23,40
8	Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	12,06	12,82	12,92	14,13	16,26	13,64
9	Jasa-jasa lainnya	13,36	13,07	13,02	13,06	12,62	12,83
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Parepare

Perbandingan antara nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 - 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.8 Perbandingan Nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Parepare		Sulawesi Selatan	
	Nilai (Rp)	Perubahan (%)	Nilai (Rp)	Perubahan (%)
2005	6.895.533	16,16	5.936.208	6,70
2006	7.740.740	12,26	6.757.265	29,50
2007	9.143.191	15,49	7.981.569	12,70
2008	11.044.881	20,80	9.895.924	21,26
2009	12.774.575	19,75	12.632.537	15,80
Rata-rata		16,89		15,26

Sumber : BPS Kota Parepare *) Angka Sementara

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Untuk mengetahui dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dapat mengacu pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2007 - 2009

No	Uraian	Tahun		
		2007	2008	2009
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,01	76,97	77,45
	Indeks Pendidikan	84,10	85,33	86,20
	<i>Angka Melek Huruf (%)</i>	<i>96,20</i>	<i>96,49</i>	<i>97,06</i>
	<i>Rata-rata Lama Sekolah (tahun)</i>	<i>9,30</i>	<i>9,45</i>	<i>9,63</i>
2	Indeks Kesehatan	79,8	80,93	81,5
	<i>Angka Harapan Hidup (tahun)</i>	<i>72,90</i>	<i>73,56</i>	<i>73,92</i>
3	Indeks Daya Beli	63,3	64,64	64,7
	<i>Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita (Rp</i>	<i>634,12</i>	<i>639,69</i>	<i>640,04</i>

Sumber : BPS Kota Parepare

3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2007 - 2011

No	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	25	30	40	45	47
2	Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk	-	-	-	60	60
3	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk	-	-	-	5	5

Sumber : Dinas OPP

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan pelayanan publik/pelayanan umum . Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

a. Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13) Sosial; (14) Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan Informatika; dan (25) Perpustakaan

1. Pendidikan

<i>Tabel 2.8 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011</i>				
Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Angka Melek Huruf (AMH) (%)	96,49	97,06	100%	100%
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59,04%	51,02%	47,52%	60%
Penduduk usia >15 tahun melek huruf	99,69%	99,95%	99,09 %	99,50%
Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	102,74%	100,33%	103,61%	116,06%
Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	84,28%	76,99%	89,28%	113,26%
Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C	117,56%	65,18%	88,26%	98%
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09%	0,11%	0,08 %	0,08%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,34%	0,35%	0,33 %	0,31%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,67%	3,75%	1,84 %	0,35%
Angka kelulusan SD/MI	90,47%	99,29%	91,00%	100%
Angka kelulusan SMP/MTs	59,47%	92,71%	95%	96%
Angka kelulusan SMA/SMK/MA	90,65%	91,59%	88,42%	97,50%
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,83%	114,53%	109,31%	-
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	221,00	215,03%	129,67%	-
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	66,79%	68,62%	73,21%	-
<i>Sumber : (1) LPPD Kota Parepare (2) Dinas Pendidikan</i>				

2. Kesehatan

<i>Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kota Parepare Tahun 2008 - 2010</i>			
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	21,18%	100 %
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,25%	81,17%	90 %
Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)	54,54%	81,82	50 %
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100 %
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	55,19%	71,07%	83,4 %

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100 %
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	55,83%	95,28%	109,95%
Cakupan kunjungan bayi	99,08%	100%	90,26 %
<i>Sumber :LPPD Kota Parepare</i>			

3. Pekerjaan Umum

<i>Tabel 2.10 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2007 - 2010</i>				
Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	95,10%	88,73 %	99,73 %
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	219,504	174,209	179,350	-
Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang	36,175	37,675	38,481	-
Panjang Jaland Dalam Kondisi Rusak	94,620	92,725	92,725	-
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	-	4,98	4,98	4,98
Kawasan kumuh	-	0,16%	0,12%	9,06%
<i>Sumber : BPS Kota Parepare dan LPPD Kota Parepare</i>				

4. Perumahan

<i>Tabel 2.11 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011</i>				
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011)*
Rumah tangga pengguna air bersih	68,72%	61,46%	61,46%	-
Rumah tangga pengguna listrik	21.710	23.835	-	-
Rumah tangga bersanitasi	68,82 %	85,26%	86,73%	-
Lingkungan pemukiman kumuh	12,60%	12%	9,06%	9,06%
Rumah layak huni	75,12%	75,49%	75,49%	75,49%
<i>Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Tata Ruang dan Wasbang</i>				

5. Penataan Ruang

<i>Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang Kota Parepare Tahun 2008 - 2011</i>				
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011)*
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per satuan luas wilayah ber HPH/HGB	178,74%	178,74%	178,74%	178,74%
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	18,23%	20,63%	17,2 %	19,00%
<i>Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Tata Ruang dan Wasbang</i>				

6. Perencanaan Pembangunan

<i>Tabel 2.13 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2007 - 2011</i>					
Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011)*
Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	-	164,44%	94,44%	94,44%	-
<i>Sumber :LPPD Kota Parepare</i>					

7. Perhubungan

<i>Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan Kota Parepare Tahun 2007 - 2011</i>					
Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Jumlah arus penumpang angkutan umum	6.012	5.980	7.448	5.104	2.550
Rasio izin trayek	73,2 %	95,2%	39,2%	56,8%	22,3 %
Jumlah KIR angkutan umum	1.276	1.033	1.076	990	1.015
Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bus	6	6	6	6	6
Rasio angkutan Darat per penumpang angkutan darat	5,02 %	5,10%	12,01 %	15,03%	8,07%
Kepemilikan KIR angkutan umum	1.276 unit	1.033 unit	1.076 unit	990 unit	1.015 unit
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Rp. 67.500	Rp. 67.500	Rp. 67.500	Rp. 67.500	Rp. 67.500
Pemasangan rambu-rambu	-	40 Buah	38 Buah	34 Buah	46 Buah
<i>Sumber :Dinas Perhubungan</i>					

8. Lingkungan Hidup

<i>Tabel 2.15 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2008 - 2009</i>		
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009
Persentase penanganan sampah	97,53%	98,67%

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	33%	100%
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	4,98	5,22%
Penegakan hukum lingkungan	100%	100%
<i>Sumber :LPPD Kota Parepare</i>		

9. Pertanian

<i>Tabel 2.16 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kota Parepare Tahun 2008 - 2010</i>			
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Penyelesaian kasus tanah Negara	71,43%	50%	71,43%
Penyelesaian izin lokasi	97,96%	100%	100%
<i>Sumber :LPPD Kota Parepare</i>			

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

<i>Tabel 2.17 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Tahun 2008 - 2010</i>			
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Kepemilikan KTP	-	85,90%	88%
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	649,81	731,32%	742,62%
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah
<i>Sumber :LPPD Kota Parepare</i>			

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<i>Tabel 2.18 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2008 - 2010</i>			
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	25,99%	15,78%	0,72%
Rasio KDRT	18%	16%	18%
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	43%	42%	33%
Partisipasi angkatan kerja perempuan	30,21%	83,20%	45,26%
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan	18%	16%	18%
<i>Sumber :LPPD Kota Parepare dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan</i>			

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.19 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Parepare Tahun 2007 - 2011

Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011)*
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,005	2,003	2,002	2,001	-
Prevalensi peserta KB aktif	58,57%	62,16%	65,12%	65,12%	65,79%
Cakupan peserta KB aktif	10.969	10.930	10.458	11.934	12.212
Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	40,74%	36,70%	36,70%	36,70%	-

Sumber : LPPD Tahun 2011 dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

13. Sosial

Tabel 2.20 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Sosial Kota Parepare Tahun 2008 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi)	10 Buah	10 Buah	10 Buah
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	23,14%	5,72%	17,13%
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	29,35%	6,14%	18,94%

Sumber : LPPD Kota Parepare

14. Ketenagakerjaan

Tabel 2.21 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kota Parepare Tahun 2007 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Angka partisipasi angkatan kerja	-	82.097	68.639	58.522
Angka sengketa pekerja – pengusaha setiap tahun	14 Kasus	16 Kasus	20 Kasus	20 Kasus
Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	53,68%	51,03%	68,63%
Pencari kerja yang ditempatkan		65,54%	52,12%	40,24%
Tingkat pengangguran terbuka	6,26%	19%	28%	5,67%
Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	8%	12%	17%	23%

Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Tenaga Kerja

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.22 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare Tahun 2008 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Persentase koperasi aktif	62,01%	65,95%	67,91%
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	100%	100%	51,68%

Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Perindag UKM

16. Kebudayaan

Tabel 2.23 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2008 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 Buah	4 Buah	5 Buah
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%

Sumber : LPPD Kota Parepare

17. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.24 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Parepare Tahun 2008 - 2011

Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Jumlah organisasi pemuda	-	-	29	29
Jumlah organisasi olahraga	-	-	28	28
Jumlah kegiatan kepemudaan	34	34	36	-
Gelandang/balai remaja (selain milik swasta)	0,008%	0,008%	0,008%	-
Lapangan olahraga	0,77	0,808%	0,49%	-

Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.25 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Parepare Tahun 2008 - 2011

Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011)*
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	8 kali	8 kali	12 Keg.	2 Keg
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 kali	1 kali	2 Keg.	4 Keg

Sumber : LPPD Kota Parepare dan Badan Kesbang dan Politik

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel 2.26 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Parepare Tahun 2007 - 2011

Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 8.000 penduduk	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	53	54	54	54	54
Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	12	12	12	12	12
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penegakan PERDA	10	10	10	10	10
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) Kota	95%	95%	95%	95%	95%
Rasio Petugas Linmas	4845	4845	4845	4845	4845
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	-	8 buah	9 buah	8 buah	8 buah
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LPPD Kota Parepare

20. Ketahanan Pangan

Tabel 2.27 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011

Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Ketersediaan regulasi ketahanan pangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Ketersediaan pangan utama	2,237	2,343%	2,378%	-

Sumber : LPPD Kota Parepare

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.28 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Parepare Tahun 2007 - 2011

Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	8	8	9	9	9

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9	10	10	10	10
Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Sumber : LPPD Kota Parepare dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan</i>					

22. Statistik

<i>Tabel 2.29 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Statistik Kota Parepare Tahun 2007 - 2011</i>					
Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Buku Parepare Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<i>Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>					

23. Kearsipan

<i>Tabel 2.30 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kearsipan Kota Parepare Tahun 2008 - 2010</i>			
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Persentase SKPD yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku	62,50%	78,12%	84%
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 keg	1 keg	1 keg
<i>Sumber : LPPD Kota Parepare</i>			

24. Komunikasi dan Informatika

<i>Tabel 2.31 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2007 - 2011</i>					
Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Jumlah jaringan komunikasi	-	-	-	84	85
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	1,553	1,555	1,589	1,605	1,891
Jumlah surat kabar nasional/lokal	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5
Jumlah penyiaran radio/TV lokal	-	6/1	6/1	6/1	6/1
Website milik pemerintah daerah	-	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah pameran / expo	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali
<i>Sumber : LPPD dan Kota Parepare dan Dinas Komunikasi dan Informatika</i>					

25. Perpustakaan

<i>Tabel 2.32 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan Kota Parepare Tahun 2008 - 2010</i>			
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Jumlah perpustakaan kota	1 Buah	1 Buah	1 Buah
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	252,96	253,57%	201
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	39,09%	38,61%	39%
<i>Sumber :LPPD Kota Parepare</i>			

b. Layanan Urusan Pilihan

Disamping urusan wajib, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pariwisata; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; dan (7) Industri. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

<i>Tabel 2.33 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kota Parepare Tahun 2007 - 2010</i>				
Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-	5,62	5,62%	5,26%
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	7,91 %	7,81%	7,79%	7,5%
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,25 %	1,24%	1,21%	-
Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,97%	0,96%	0,95%	-
<i>Sumber :(1) BPS Kota Parepare (2) LPPD Kota Parepare</i>				

2. Kehutanan

<i>Tabel 2.34 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kehutanan Kota Parepare Tahun 2008 - 2010</i>			
Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	20,13%	20,13%	74,74%
Kerusakan kawasan hutan	1,03%	1,03%	39,74%
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0 %	0 %	0 %
<i>Sumber : BPS Kota Parepare</i>			

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 2.35 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Parepare Tahun 2008 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010)*
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Harga Konstan)	0,31%	0,32%	0,30%	0,31%
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Harga Berlaku)	0,32%	0,34%	0,31%	0,32%

Sumber : BPS Kota Parepare

4. Pariwisata

Tabel 2.36 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pariwisata Kota Parepare Tahun 2007 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Kunjungan wisata (orang)	-	225.594	361.882	392.882
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Harga Konstan)	0,30%	0,29%	27,86%	30,25%

Sumber : BPS Kota Parepare dan Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata

5. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.37 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2008 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Produksi perikanan	56,04%	47,63%	90,92%
Konsumsi ikan	66,67%	66,67%	60,50%

Sumber : LPPD Kota Parapare

6. Perdagangan

Tabel 2.38 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perdagangan Kota Parepare Tahun 2007 - 2010

Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga konstan)	22,83%	23,19%	27,86%	26,74%
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga berlaku)	20,17%	21,31%	12,02%	-

Sumber : BPS Kota Parepare

7. Industri

<i>Tabel 2.39 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Industri Kota Parepare Tahun 2007 - 2010</i>				
Indikator Kinerja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Kontribusi sector industry terhadap PDRB (Harga Konstan)	3,01%	2,93%	2,63%	2,45%
Kontribusi sektor industry terhadap PDRB (Harga berlaku)	12,04%	11,57%	8,97%	12,59%
Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sector industry (Harga konstan)	5.778.970.000	6.029.990.000	6.335.960.000	-
Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sector industry (Harga berlaku)	8.583.730.000	10.120.830.000	11.278.26.000	-
Pertumbuhan industri	-	2,23%	21,64%	2,67%
<i>Sumber : (1) LPPD Kota Parepare</i>			<i>(2) BPS Kota Parepare</i>	

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan atau domestik. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2010. RKPD tersebut memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2011. Namun, tidak semua program/kegiatan yang ada dalam RKPD dapat diakomodir ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun 2011, dikarenakan adanya penerapan skala prioritas terhadap terhadap program / kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga hanya program/kegiatan yang bersifat urgen dan merupakan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang diutamakan dalam penyusunan APBD.

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan. Dalam RKPD Tahun 2011, jumlah program / kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebanyak 12 program dan 111 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 59.156.438.430,-. Dalam APBD Kota Parepare Tahun 2011 hanya memperoleh anggaran sebesar Rp. 54.258.822.095,- atau 91,72 % yang terdiri atas 11 program dan 116

kegiatan (7 kegiatan lanjutan tahun 2010) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,24 %.

2. Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. Andi Makkasau. Pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dalam RKPD sebesar Rp. 17.384.085.000, - yang terdiri atas 14 program dan 65 kegiatan. Dalam APBD anggaran yang didistribusikan untuk Dinas Kesehatan hanya 82,99 % atau sebesar Rp. 14.427.736.419,- dengan 11 program dan 81 kegiatan (9 kegiatan lanjutan tahun 2010). Tingkat capaian kinerja Dinas kesehatan 89,30 %.

3. RSUD. A. Makkasau

RSUD. A. Makkasau dalam RKPD merencanakan untuk melaksanakan 9 program dan 53 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.591.835.375,-. Namun realisasi dalam APBD tahun 2011 sebesar 25.568.857.275,- (108,38 %) dengan 9 program dan 59 kegiatan (12 kegiatan lanjutan). Tingkat capaian kinerja tahun 2010 sebesar 80,53%

4. Dinas Pekerjaan Umum

Dalam RKPD tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum merencanakan 16 program dan 68 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.570.415.400. Dalam APBD tahun 2011 diakomodir sebesar Rp. 87.345.430.690,- yang terdiri atas 16 program dan 78 kegiatan (22 kegiatan lanjutan). Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010 adalah 80,53 %

5. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan urusan wajib penataan ruang, dalam RKPD tahun 2011 merencanakan anggaran sebesar Rp. 12.246.476.200,- terdiri atas 11 program dan 50 kegiatan. Dalam APBD hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.328.297.740 (92,50 %) terdiri atas 12 program dan 57 kegiatan (8 kegiatan lanjutan). Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2010 sebesar 96,11 %.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik, dalam RKPD merencanakan pagu indikatif sebesar Rp. 5.988.750.000,- dengan 18 program dan 77 kegiatan. Dalam perkembangan selanjutnya, alokasi anggaran untuk Bappeda yang tertuang dalam APBD hanya sebesar Rp. 4.443.065.000 (74,19%) dengan 13 program dan 66 kegiatan. Capaian Kinerja Bappeda untuk tahun 2010 sebesar 85,37 %.

7. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dalam RKPD tahun 2011 merencanakan 8 program dan 38 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.919.383.500,-, namun yang terealisasi dalam APBD hanya 69,99 % atau sebesar Rp. 2.743.342.000,- yang terdiri atas 8 program dan 40 kegiatan (4 kegiatan lanjutan). Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2010 adalah 97,93 %.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dalam RKPD tahun 2011 merencanakan anggaran sebesar Rp. 1.718.718.450 dengan 6 program dan 41 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2011 terealisasi 65,99 % atau sebesar Rp. 1.134.162.000,- dengan 6 program dan 30 kegiatan.

9. Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan lingkungan hidup bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dalam RKPD tahun 2011, SKPD ini merencanakan pagu indikatif sebesar Rp. 3.621.000.000,- untuk membiayai 10 program dan 33 kegiatan. Namun dalam APBD tahun 2011 terealisasi anggaran sebesar Rp. 4.060.278.550,- (112,13 %) yang terdiri atas 11 program dan 38 kegiatan (2 kegiatan lanjutan). Capaian Kinerja tahun 2010 adalah 93,80 %.

10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam RKPD tahun 2011, Dinas Kebersihan merencanakan anggaran sebesar Rp. 6.333.828.300,- dengan 7 program dan 24 kegiatan. Dalam APBD tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.851.475.150,- (108,17 %) untuk membiayai 7 program dan 25 kegiatan (1 kegiatan lanjutan). Untuk tahun 2010, capaian kinerja Dinas Kebersihan adalah 97,12 %.

11. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan dua urusan, yaitu (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan (2) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam RKPD tahun 2011, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 2.538.996.200 dengan 13 program dan 44 kegiatan. Namun yang terealisasi dalam APBD sebesar Rp. 2.741.095.000,- (107,96 %) yang terdiri atas 10 program dan 29 kegiatan. Capaian Kinerja pada tahun 2010 adalah 90,78 %.

12. Dinas Sosial

Dinas Sosial menyelenggarakan urusan sosial, dimana dalam RKPD tahun 2011 merencanakan anggaran Rp. 2.091.537.000 dengan 9 program dan 53 kegiatan. Dalam APBD hanya direalisasikan 83,65 % atau sebesar Rp. 1.749.467.000,- (83,65%) untuk membiayai 8 program dan 41 Kegiatan (2 Kegiatan lanjutan). Capaian kinerja SKPD untuk tahun 2010 adalah 93,02 % .

13. Dinas Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dalam RKPD tahun 2011 merencanakan 9 program dan 61 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.121.065.000. Dalam APBD direalisasikan 43,38 % atau sebesar Rp. 1.787.747.325 dengan 7 program dan 41 kegiatan (1 kegiatan lanjutan). Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2010 adalah 95 %.

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Anggaran dalam RKPD tahun 2011 sebesar Rp. 1.871.461.450 dengan 7 program dan 40 kegiatan. Namun yang direalisasikan dalam APBD hanya 64,52 % atau Rp. 1.207.449.025 untuk membiayai 5 program dan 26 kegiatan. Sebagai SKPD baru, capaian kinerjanya akan diukur setelah tahun anggaran 2011 berakhir.

15. Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata

Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan, yaitu : (1) Kepemudaan dan olahraga; dan (2) pariwisata. Untuk tahun 2011 merencanakan 11 program dan 48 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 7.211.500.000, namun dalam APBD direalisasikan 37,09 % atau sebesar Rp. 2.674.952.897 dengan 11 program dan 37 kegiatan. Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun 2010 adalah 85,52 %.

16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam RKPD tahun 2011, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 2.192.316.885 dengan 10 program dan 49 kegiatan. Dalam APBD terealisasi Rp. 1.703.449.775 (77,70 %) dengan 9 program dan 34 kegiatan (1 kegiatan lanjutan). Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 adalah 95,94 %

17. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satpol Pamong Praja merencanakan dalam RKPD tahun 2011 anggaran sebesar Rp. 2.171.500.000,- untuk membiayai pelaksanaan 9 program dan 32 kegiatan. Dalam APBD tahun 2011 hanya dialokasikan 74,23 % atau Rp. 1.611.905.000,- dengan 8 program dan 28 kegiatan. Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2010 adalah 97,20 %

18. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Parepare menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, dalam RKPD mengalokasikan pagu indikatif Rp. 24.397.936.500 dengan 20 program dan 155 kegiatan. Untuk merealisasikan rencana tersebut dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 28.426.892.725 (116,51 %) untuk membiayai 19 program dan 169 kegiatan (17 kegiatan lanjutan). Capaian kinerja pada tahun 2010 adalah 100 %.

19. Sekretariat DPRD

Dalam RKPD tahun 2011, Sekretariat DPRD mengusulkan anggaran Rp. 13.685.605.000 (8 program dan 47 kegiatan), dalam APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.259.055.255 (111,50 % dari rencana) dengan 7 program dan 52 kegiatan (6 kegiatan lanjutan). Tingkat kinerja Sekretariat DPRD untuk tahun 2010 mencapai 83,67 %.

20. Dinas Pendapatan

Dinas Pendapatan daerah merencanakan anggaran Rp. 8.338.835.205 dalam RKPD dengan 5 program dan 45 kegiatan. Dalam APBD dialokasikan anggaran yang lebih besar 119,87 % atau Rp. 9.997.111.765,- dengan 5 program dan 45 kegiatan. Sebagai SKPD yang baru terbentuk, capaian kinerja akan diukur setelah berakhirnya tahun anggaran 2011.

21. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mengusulkan anggaran dalam RKPD tahun 2011 sebesar Rp. 3.554.145.000,- dengan 7 program dan 38 kegiatan. Dalam APBD disiapkan anggaran 44,49 % dari yang diusulkan atau sebesar Rp. 1.581.220.000 untuk membiayai 7 program dan 25 kegiatan. Capaian kinerja tahun 2010 adalah 100%.

22. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Dalam RKPD tahun 2011, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mengusulkan 7 program dan 44 kegiatan dengan anggaran Rp. 4.717.853.740. Dalam APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.417.364.353 atau 114,83 % dari usulan semula dengan 7 program dan 39 kegiatan. Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2010 adalah 93,02 %.

23. Kantor Pelayanan Perizinan

Kantor Pelayanan Perizinan mengusulkan program dan kegiatan dalam RKPD masing-masing 6 program dan 23 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 900.000.000, namun yang dialokasikan dalam APBD meningkat 111,06 % menjadi Rp. 999.500.000,- dengan 6 program dan 25 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 adalah 93,15 %.

24. Kecamatan Bacukiki

Kecamatan Bacukiki mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.337.349.000 dengan 5 program dan 28 kegiatan. Dalam APBD tahun 2011 dialokasikan anggaran lebih besar 120,21 % menjadi Rp. 1.607.693.100 untuk membiayai 5 program dan 31 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 mencapai 89 %.

25. Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 2.514.428.000 dengan 5 program dan 30 kegiatan. Dalam APBD tahun 2011 hanya dialokasikan anggaran 67,44 % menjadi Rp. 1.695.625.000 untuk membiayai 5 program dan 29 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 mencapai 95 %.

26. Kecamatan Ujung

Kecamatan Ujung mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 2.412.800.000 dengan 5 program dan 33 kegiatan. Dalam APBD tahun 2011 dialokasikan anggaran 62,61 % atau sebesar Rp. 1.510.600.000 untuk membiayai 5 program dan 26 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 mencapai 90 %.

27. Kecamatan Bacukiki Barat

Kecamatan Bacukiki Barat mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 2.574.094.500 dengan 5 program dan 30 kegiatan. Dalam APBD tahun 2011 hanya dialokasikan anggaran 72,80 % atau sebesar Rp. 1.873.881.000 untuk membiayai 5 program dan 30 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 mencapai 88,79 %.

28. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang pada tahun 2011 mengusulkan dalam RKPD anggaran sebesar Rp. 2.943.157.202 dengan 10 program dan 45 kegiatan, namun dialokasikan anggaran dalam APBD hanya 41,39 % atau sebesar Rp. 1.218.172.100 untuk membiayai pelaksanaan 9 program dan 35 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 adalah 98,21 %.

29. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Tingkat capaian kinerja BPMK pada tahun 2010 adalah 97,13 %, dan dalam RKPD tahun 2011 mengusulkan 8 program dan 47 kegiatan yang membutuhkan anggaran Rp. 3.817.000.000, -, yang terakomodir dalam APBD hanya 42,57 % atau sebesar Rp. 1.624.768.700 dengan 6 program dan 29 kegiatan.

30. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yakni urusan kearsipan dan perpustakaan. Pada tahun 2010 tingkat capaian kerjanya adalah 91 %. Untuk meningkatkan kerjanya, SKPD ini mengusulkan dalam RKPD tahun 2011 anggaran sebesar Rp. 3.694.300.000 dengan 9 program dan 39 kegiatan, namun yang terealisasi dalam APBD hanya 36,33 % atau sebesar Rp. 1.342.045.000 dengan 7 program dan 33 kegiatan.

31. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pilihan, yaitu : Pertanian, Kehutanan, kelautan dan perikanan. Pada tahun 2010, Dinas PKPK memperoleh capaian kinerja 97,78 %. Dalam RKPD tahun 2011 mengusulkan anggaran sebesar Rp. 10.710.500.000 untuk membiayai 24 program dan 70 kegiatan, namun yang direalisasikan dalam APBD hanya Rp. 5.884.500.150 (54,94 %) dengan 18 program dan 45 kegiatan.

32. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan urusan wajib (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dan urusan pilihan (perindustrian dan perdagangan), capaian kinerja pada tahun 2010 adalah 97,13 %. Dalam APBD tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.269.100.000,- dengan 12 program dan 54 kegiatan, alokasi ini lebih rendah dibanding usulan dalam RKPD yang mencapai Rp. 11.840.500.000 dengan 18 program dan 84 kegiatan.

33. Sekretariat KORPRI

Sekretariat KORPRI merupakan unit kerja baru sehingga penganggarnya belum tertuang di dalam RKPD tahun 2011. Anggaran unit kerja ini dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2011 sebesar Rp. 600.000.000, dengan 5 program dan 12 kegiatan. Dalam APBD tahun 2011 direalisasikan anggaran sebesar Rp. 605.240.000,- dengan 5 program dan 20 kegiatan.

Sedangkan hasil evaluasi program / kegiatan tahun 2010 terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepate tahun 2008 – 2013, dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian Sasaran Strategis	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)	86,27 %
2	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	77,02 %
3	Peningkatan Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	74,97 %
4	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Pendidikan	92,90 %
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan	83,85 %
6	Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya	86,65 %
7	Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga	88,32 %
8	Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik	99,93 %
9	Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman	86,80 %
10	Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan	88,14 %
11	Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup	69,44 %
12	Penanggulangan dampak lingkungan	82,18 %
13	Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup	73,53 %
14	Penataan Kebersihan dan keindahan kota secara efektif, terpadu dan berkelanjutan	99,60 %
15	Masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global	100 %
16	Peningkatan Kehidupan spiritual-keagamaan	98,24 %
17	Berfungsinya Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat	86,00 %
18	Peningkatan Teknostruktur masyarakat dalam menghasilkan produk unggulan sesuai potensi lokal dan peluang yang dapat dimanfaatkan	100,00 %
19	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	100,00 %
20	Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan	84,89 %
21	Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit	80,61 %
Rata-rata Capaian Kinerja		86,67 %
<i>Sumber : LAKIP Kota Parepare Tahun 2010</i>		

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare telah membawa kemajuan yang signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan mengidentifikasi substansi masalahnya kemudian memberikan solusi yang cerdas sehingga pencapaian target indicator kinerja dapat terealisasi keseluruhan pada tahun 2013.

2.3.1 Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi pencapaian target sasaran strategis ada beberapa sector yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih focus oleh seluruh *stakeholders* pembangunan di Kota Parepare. Apabila permasalahan ini tidak diatasi sedini mungkin akan mempengaruhi secara negatif pencapaian visi dan misi pembangunan.

a. Pendidikan

Pelaksanaan program / kegiatan bidang pendidikan telah berhasil mendukung program pendidikan gratis dari pemerintah propinsi. Sebagai salah satu barometer perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan. Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan telah berhasil melaksanakan program – program peningkatan layanan dan kualitas pendidikan dengan rata-rata tingkat capaian kinerjanya adalah 92,90 %. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Rata-rata lama sekolah baru dicapai pada tingkat Kelas 3 SMP. Lama sekolah merupakan indikator pendidikan suatu daerah dimana pemerintah Kota Parepare berharap agar rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun.
- 2) Kualifikasi guru yang dapat disertifikasi sesuai kompetensinya adalah yang berpendidikan minimal strata satu (S1). Prosentase guru yang berpendidikan S1 mencapai diatas 20%. Masalah lain yang dihadapi guru yang telah berkualifikasi S1 adalah mata pelajaran yang diampuh tidak sesuai dengan kualifikasi kesarjanaannya, hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan jumlah minimal jam mengajar untuk keperluan sertifikasi.
- 3) Kemampuan guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran juga masih rendah khususnya dalam menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan perkembangan informasi teknologi di sekolah.

b. Kesehatan

Pelaksanaan program kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ini tercermin dari capaian kinerja indikator kesehatan pada tahun 2010 mencapai 85,60 %. Angka harapan hidup (AHH) untuk tahun 2009 mencapai 73,92 lebih tinggi dibanding AHH Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 69,83. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas maupun pada unit layanan masyarakat masih memiliki keterbatasan peralatan deteksi dini jenis penyakit khususnya malaria dan penyakit lainnya.
- 2) Pelayanan kesehatan penyakit menular melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang belum memiliki peta sumber penyakit menular, seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya.
- 3) Pelayanan kesehatan rujukan RSUD. A. Makassar belum memiliki sinergitas dengan layanan rumah sakit daerah lain asal pasien.
- 4) Pelayanan kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat masih rendah dalam upaya peningkatan gizi balita, ibu hamil dan pemantauan jajanan anak sekolah.

c. Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah Kota Parepare. Pada tahun 2009, jumlah rumah tangga miskin mencapai 936 RTM (3.564 jiwa) atau mengalami penurunan jika dibanding tahun 2008 yang mencatat angka 1.263 RTM (5.306). Walaupun berkurang, namun angka ini masih cukup tinggi yaitu 3 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Parepare.

Penanggulangan kemiskinan masih berfokus pada pemberian bantuan langsung dan masih rendahnya keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait.

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pemerintahan Umum

Isu utama yang mendasari lahirnya gerakan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana pemerintahan daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung oleh birokrasi yang mempunyai komitmen kuat dan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui terkait hal tersebut, antara lain :

- 1) Pola penerimaan pegawai masih monoton dalam melakukan seleksi CPNS, sehingga tidak menghasilkan pegawai yang memiliki kemampuan kompetensi baik ditunjang oleh latar belakang pendidikan maupun keterampilannya. Pemerintah daerah belum menetapkan tambahan kompetensi pada lulusan atau Calon PNS untuk ditempatkan sesuai kompetensi berdasarkan seleksi lokal pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun pola rekrutmen yang lebih mengutamakan uji kompetensi bagi peserta sehingga pembangunan aparatur yang professional dapat terwujud.

- 2) Pola pengisian jabatan belum transparan dan profesional dimana pengisian jabatan belum dilaksanakan secara obyektif. Penempatan aparat pada jabatan tertentu belum sepenuhnya disesuaikan dengan standar keahlian dan pengalaman serta pendidikan formal dan non formal yang telah dimiliki terkait jabatan tersebut sehingga terkadang penempatan seseorang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki yang berakibat pada kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Koordinasi antar SKPD juga merupakan masalah lain yang dihadapi. Ego-ego sektoral masih biasa tampak dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Lemahnya kerjasama / koordinasi antar SKPD menyebabkan masalah pembangunan yang seharusnya lintas sektoral diselesaikan secara parsial.

Kapasitas aparatur pemerintah daerah yang masih rendah merupakan dampak dari pola rekrutmen, promosi dan pengisian jabatan yang tidak berdasarkan pada uji kompetensi. Akibatnya, penguasaan pada tugas pokok dan fungsinya masih rendah yang berdampak pula pada pelayanan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur melalui jenjang pendidikan formal juga belum terencana dengan baik, sehingga banyak aparat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Aparat cenderung memilih sendiri pendidikan formal lanjutan yang dianggap mudah tamat dan tidak didasarkan pada kebutuhan keahlian sesuai dengan tupoksinya. Akibatnya, banyak aparat yang memperoleh gelar kesarjanaan S2 hanya bertumpuk pada satu bidang keahlian saja, sedangkan kompleksitas tugas pemerintahan daerah menuntut adanya sinergitas keahlian personil dari berbagai bidang keahlian.

b. Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik terkait dalam proses aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang investasi, perdagangan dan jasa terkait proses perizinan usaha belum dikelola secara maksimal. Kondisi ini menghambat dan memperlemah kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Ditambah pula belum adanya tindak lanjut terhadap Standar Pelayanan Minimal yang baku dan disepakati untuk semua SKPD sesuai PP Nomor 65 Tahun 2005, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, serta permendagri No. 27 Tahun 2007.

Dengan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka tantangan bagi pemerintah bagaimana menentukan langkah langkah kebijakan yang efektif dan strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta kewajiban bagi SKPD untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Upaya pemerintah ini harus didukung oleh peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

c. Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Desentralisasi fiskal sebagai salah satu prinsip otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Agar belanja atau pengeluaran dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Perda Nomor 1 Tahun 2010 yang memberi penegasan bahwa harus ada keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam arti semua belanja kegiatan harus dapat menyelesaikan permasalahan dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana.

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah selama ini masih banyak menemui kendala, antara lain :

a. Kurang jelasnya target yang akan dicapai dalam RPJMD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare terdapat sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan dilengkapi dengan indikator kerjanya. Namun, tahapan – tahapan pencapaian sasaran strategis tersebut tidak secara jelas dibreakdown menjadi sasaran strategis tahunan, ditambah pula indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak semuanya menjadi indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait. Yang paling mengkhawatirkan adalah indikator kinerja yang ditetapkan tidak dilengkapi dengan target yang akan dicapai. Hal ini menyebabkan SKPD melakukan improvisasi sendiri dalam menetapkan target terhadap sasaran strategis tersebut. Hal ini menyebabkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang menjadi turunan RPJMD secara substansi telah kehilangan arah.

Pemetintah daerah telah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan melakukan Revisi terhadap RPJMD Kota Parepare tahun 2008 – 2013, yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2011. Diharapkan dengan revisi ini akan memuat target yang akan dicapai terhadap indikator-indikator kinerja, sehingga SKPD dapat menetapkan target dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

b. Tidak adanya konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran selama tidak berfungsi sebagaimana mestinya tetapi fungsinya hanya sebatas pemenuhan persyaratan administrasi saja. Hal ini menyebabkan banyak program / kegiatan yang tertuang dalam APBD tidak tercantum dalam RKPD atau sebaliknya program/kegiatan prioritas yang ada dalam RKPD tidak tertuang dalam APBD. Hal ini menyebabkan pengalokasian anggaran bagi SKPD tidak sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Ke depan diharapkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD bersepakat untuk tidak mengakomodir program / kegiatan dalam APBD yang

tidak tertuang dalam RKPD, sehingga dapat menciptakan terwujudnya konsistensi antara dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.

- c. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah penetapan indikator kinerja yang selama ini masih terfokus pada pencapaian *output*. Padahal pencapaian kinerja *output* sangatlah naif untuk dijadikan indikator pencapaian sasaran strategis. Seharusnya, pemerintah daerah melalui SKPD lebih banyak menampilkan pencapaian kinerja *outcome* bahkan jika memungkinkan pencapaian kinerja *impact*, sebab indikator kinerja inilah yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

BAB III.....

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui efektifitas kebijakan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dilihat dari sisi pengeluaran, investasi lokal yang merupakan penggerak perekonomian perlu didukung oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan tersebut pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2012, yaitu melalui :

- a. Peningkatan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha baik skala kecil, menengah maupun besar.
- b. Percepatan pembangunan prasarana.
Percepatan pembangunan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi.
- c. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah daerah berupa mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana PNPM.
- d. Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, fasilitas dan pembinaan manajemen usaha-usaha UMKM dan mendorong perkembangan sektor-

sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

- e. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun 2011 (tahun berjalan)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2006 – 2010), struktur perekonomian Kota Parepare tidak mengalami pergeseran secara mendasar. Hal ini terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana sektor perdagangan, hotel dan resetoran selalu memberikan kontribusi terbesar, disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Walaupun demikian, PDRB Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Berdasarkan data sementara, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 (dalam juta) sebesar Rp. 1.796.670,56 mengalami peningkatan sebesar 18,27 % dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar Rp. 1.519.156,10 demikian pula PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp. 707.234,85 pada tahun 2009 menjadi Rp. 767.162,91 pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 8,47 %. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			Tahun 2009	Tahun 2010		Tahun 2011	Tahun 2012
1	PDRB (Harga Berlaku)	Rp. (dalam juta)	1.519.156,10	1.796.670,56	277.514,46	2.066.171,15	2.376.096,83
2	PDRB (Harga Konstan)	Rp.	707.234,85	767.162,91	59.928,06	820.864,32	878.324,83
3	Tingkat inflasi	%	1,40	5,79	4,39	5,00	4,80
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,93	*)	-	8,00	8,1%
5	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	12.225	*)	-	11.000	10.000
6	Tingkat pengangguran	%	27,89	*)	-	23	20
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,51	*)	-	1,1	1,1
8	Angka Partisipasi Murni						
	a. SD	%	100,33	103,61	-	116,66	117
	b. SMP		76,99	89,28	-	113,26	115
	c. SMU/SMK		65,18	88,26	-	98	100
9	Angka Melek Huruf	%	97,06	100	2,94	100	100
10	Angka Harapan Hidup		73,92	*)	-	74	75
11	Paritas Daya Beli	Rp.	640.040	*)	-	670.000	700.000

Sumber : BPS Kota Parepare dan Bappeda Kota Parepare *) Data masih sementara diolah

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013

Keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya modal dan teknologi menjadi tantangan utama pemerintah daerah pada tahun 2012 dan 2013. Tantangan – tantangan tersebut perlu diantisipasi dan mencari solusi terabik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro dan kecil yang berbasis rumah tangga dan kelompok. Usaha ekonomi kerakyatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Pemerintah akan melakukan pembinaan melalui berbagai bimbingan teknis, dan manajemen pemasaran serta tidak menutup kemungkinan pemberian bantuan modal usaha.

Disamping itu, meskipun Kota Parepare bukan merupakan daerah pertanian namun pemerintah tetap memberikan perhatian yang luas terhadap sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan daya beli petani. Perhatian ini akan diimplementasikan melalui perbaikan infrastruktur pertanian, pemberian bantuan alat-alat pertanian bagi kelompok petani, dan bantuan bibit tanaman serta penyuluhan yang intensif dari penyuluh pertanian.

Demikian pula untuk sektor perikanan, pemerintah akan mendorong masyarakat mengembangkan usaha perikanan darat. RKPD tahun 2012 banyak mengakomodir usulan masyarakat dalam mengembangkan budidaya ikan air tawar sebagai alternatif sumber pendapatan baru. Diharapkan usaha ini akan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Untuk perikanan tangkap, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan PPI Cempae sehingga akan memberikan nilai tambah bagi nelayan selain bantuan peralatan dan keterampilan lainnya bagi ke;uarga nelayan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare ditujukan pada terwujudnya Kota Parepare sebagai 'bandar madani' melalui terciptanya masyarakat mandiri, religius dan berkomitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainability development*) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah diarahkan, pada:

1. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;
2. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum. Surplus secara bertahap, bukan berarti mengurangi belanja pemerintah kota, tetapi mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan sarana dan fasilitas publik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013 dan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2012

No	Uraian	Proyeksi RPJMD (Rp)	Proyeksi RKPD (Rp)
I	PENDAPATAN DAERAH	417.984.000.000,-	468.142.882.822
I.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38.607.000.000,-	45.089.913.425
I.1.1	Pajak daerah	5.102.000.000,-	7.730.550.355,82
I.1.2	Retribusi daerah	25.073.000.000,-	25.339.173.209,97
I.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	1.531.000.000,-	1.518.009.655,07
I.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	6.901.000.000,-	10.502.180.204,14
I.2	Dana Perimbangan	355.863.000.000	384.619.397.791
I.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	29.722.000.000,-	56.717.694.591
I.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	274.706.000.000,-	304.223.493.200
I.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	51.435.000.000,-	23.678.210.000
I.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.514.000.000,-	38.433.571.606
I.3.1	Hibah	-	-
I.3.2	Dana darurat	4.052.000.000,-	-
I.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	13.139.000.000,-	32.231.287.166
I.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	35.000.000.000
I.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	6.323.000.000,-	6.202.284.440
II	BELANJA DAERAH	471.754.000.000,-	533.857.053.122
II.1	Belanja Tidak Langsung	224.677.000.000,-	313.257.823.000
II.1.1	Belanja pegawai		301.167.823.000

II.1.2	Belanja bunga		4.500.000.000
II.1.3	Belanja subsidi		-
II.1.4	Belanja hibah		1.500.000.000
II.1.5	Belanja bantuan sosial		5.225.000.000
II.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya		-
II.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya		515.000.000
II.1.8	Belanja tidak terduga		350.000.000
II.2	Belanja Langsung	247.077.000.000,-	220.599.230.122
II.2.1	Belanja pegawai		
II.2.2	Belanja barang dan jasa		
II.2.3	Belanja modal		
Surplus / Defisit		-	(65.714.170.300)
III	PEMBIAYAAN DAERAH	-	65.714.170.300
III.1	Penerimaan Pembiayaan	-	71.914.170.300
III.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	-	25.000.000.000
III.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-
III.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
III.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	46.914.170.300
III.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-
III.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	6.200.000.000
III.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
III.2.2	Penyertaan modal (Investasi daerah)	-	2.700.000.000
III.2.3	Pembayaran pokok utang	-	3.500.000.000
III.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-
III.3	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berkenan (SILPA)	-	-
<i>Sumber : RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2012</i>			

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah yang telah dikeluarkan pemerintah merefleksikan pengaturan pendanaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, oleh karenanya kepala daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau

dikenal sebagai dana perimbangan. Belanja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN serta pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas perbantuan didanai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Jadi, secara umum sumber pendanaan yang diimplementasikan di daerah menjadi investasi bagi daerah, selain dilakukan melalui investasi swasta, juga berupa investasi pemerintah melalui *government expenditure*, yang dimuat dalam APBD dan APBN. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah secara garis besar terdiri atas tiga kelompok pendanaan.

Pertama, Dana Desentralisasi. Pemerintah telah mendesentralisasikan wewenang sebagian besar dari belanja pemerintah kepada pemerintah daerah, dan hasilnya pemerintah daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten) di Indonesia sekarang membelanjakan 37% dari total dana publik. Ini mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer Dana Perimbangan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Parepare berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi ini dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU besarnya dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus diperkirakan pula akan lebih besar pada tahun-tahun mendatang mengingat banyaknya kebijakan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kedua, Dana Dekonsentrasi. Ini terkait dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada kepala daerah sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Ketiga, Dana Tugas Pembantuan, merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2012, pemerintah memproyeksikan dana perimbangan khususnya DAU dan DAK tetap menjadi sumber pendapatan utama, namun untuk menunjukkan kemampuan fiskal daerah maka pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak/SDA daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah ini, diharapkan

berkontribusi lebih besar, baik terhadap total pendapatan daerah maupun menjadi sumber utama dalam mendanai kebutuhan total belanja daerah, khususnya diharapkan mampu mendanai sekitar 82% kebutuhan belanja modal pada tahun 2012 dan 2013 yang akan datang.

Untuk menghindari terjadinya distorsi ekonomi daerah yang dapat dipicu oleh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, maka proporsi peningkatan PAD akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan PAD yang berasal dari pertumbuhan laba BUMD dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama PAD, tetapi akan dilakukan secara cermat melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu.

Arahan kebijakan yang spesifik ditujukan untuk peningkatan PAD tahun 2012, antara lain: (1) Perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi; (2) Pembuatan dan penegasan aspek legalitas dasar-dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah; (3) Pengembangan perusahaan daerah dan penyertaan modal berorientasi profit, sejalan dengan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah yang di samping berorientasi profit juga menjalankan pelayanan dasar masyarakat; (4) Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah; (5) Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan *software* sistem informasi; (6) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; dan (7) Mengoptimalkan pengelolaan DAU dan DAK, serta (8) Meningkatkan kapasitas pendapatan melalui perencanaan yang lebih baik.

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (dalam juta Rp)				
		Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rencana 2011	Proyeksi 2012	Proyeksi 2013
I	PENDAPATAN DAERAH	367.764	425.286	530.065	468.143	501.300
I.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37.378	45.090	50.681	45.090	52.202
I.1.1	Pajak daerah	4.920	6.662	8.689	7.731	8.950
I.1.2	Retribusi daerah	23.105	31.651	28.481	25.339	29.336
I.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	1.634	1.672	1.706	1.518	1.757
I.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.719	5.105	11.805	10.502	12.159
I.2	Dana Perimbangan	309.582	318.683	394.430	384.619	410.020
I.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	23.087	28.870	88.457	56.718	45.3754
I.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	242.064	266.299	276.567	304.223	334.646
I.2.3	Dana Alokasi Khusus	44.431	23.514	29.406	23.678	30.000

	(DAK)					
I.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.804	61.513	84.954	38.434	39.078
I.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
I.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
I.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	12.696	16.591	32.231	32.231	32.876
I.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	2.958	-	46.520	35.000	35.000
I.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5.151	5.964	6.202	6.202	6.202
I.3.6	Dana penguatan desentralisasi Fiskal dan percepatan pembangunan	-	38.958	-	-	-

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah untuk tahun 2012, difokuskan pada arah keseimbangan belanja pegawai dan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal. Selama periode tahun 2009-2011, alokasi belanja tidak langsung rata-rata mencapai 44,61% dari total belanja daerah, sedang untuk belanja langsung mencapai rata-rata 55,39%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih cukup baik dimana belanja langsung yang merupakan belanja publik masih lebih tinggi dibanding belanja gaji pegawai. Demikian pula untuk komposisi belanja langsung masih didominasi oleh belanja modal sebesar 55,00%, disusul belanja barang dan jasa 36,41% dan sisanya 8,59 % untuk membiayai operasional pegawai.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dibutuhkan alokasi belanja daerah yang bukan hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga tepat sasaran pada sektor-sektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Kualitas pertumbuhan yang tinggi, tidak hanya menekankan pertumbuhan output dari aktivitas ekonomi Kota Parepare yang tinggi, tetapi juga harus mampu memberikan efek perubahan pada aspek-aspek sosial ekonomi lainnya. Belanja daerah diharapkan mampu melahirkan transformasi struktur ekonomi masyarakat dari yang *bervalue added* rendah ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas, meningkatnya kualitas hidup serta menjamin keadilan ekonomi masyarakat Kota Parepare.

Secara spesifik, kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota;
- b. Pagu indikatif wilayah akan mulai diterapkan pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.000.000.000,- pagu indikatif wilayah merupakan anggaran yang disiapkan untuk membiayai seluruh kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang. Pagu indikatif wilayah akan dikelola oleh SKPD teknis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sehingga pada akhirnya merupakan bagian dari pagu sektoral SKPD.
- c. Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
- d. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;
- e. Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan;
- f. Alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya untuk: (i) industri-industri produk lokal dan kelompok ekonomi lemah; (ii) bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial dalam rangka pembangunan modal sosial;
- g. Pemerintah Kota harus melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritas program-program pembangunan strategis.

Adapun realisasi dan proyeksi / target belanja daerah Kota Parepare tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (dalam juta Rp)				
		Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rencana 2011	Proyeksi 2012	Proyeksi 2013
II	BELANJA DAERAH	391.894	475.731	575.267	533.857	513.600
II.1	Belanja Tidak Langsung	182.971	210.923	267.317	313.258	342.635
II.1.1	Belanja pegawai	161.849	195.279	255.227	301.168	331.285
II.1.2	Belanja bunga	2.377	3.635	4.500	4.500	4.500
II.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
II.1.4	Belanja hibah	19.954	6.185	1.500	1.500	1.500
II.1.5	Belanja bantuan sosial	5.663	5.633	5.740	5.225	5.000
II.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /kabupaten / Kota dan Pemerintah	-	-	-	-	-

	Daerah lainnya					
II.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya	-		-	515	-
II.1.8	Belanja tidak terduga	128	190,8	350	-	350
II.2	Belanja Langsung	208.922	264.774	307.950	220.599	170.965
II.2.1	Belanja pegawai	21.174	24.373	26.543		
II.2.2	Belanja barang dan jasa	83.599	106.599	116.260		
II.2.3	Belanja modal	104.149	133.780	165.148		

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.

Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2012 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta transfer dari dana cadangan. Jika pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi yang mendesak untuk dilakukan pinjaman maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan, antara lain : (i) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya. (ii) rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio-DSCR*) paling sedikit 2,5. (iii) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. (iv) mendapatkan persetujuan dari DPRD, persetujuan DPRD termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruskan/dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

No	Uraian	Jumlah (dalam juta Rp)				
		Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rencana 2011	Proyeksi 2012	Proyeksi 2013
III	PEMBIAYAAN DAERAH	86.047	16.097	45.203	65.714	12.300
III.1	Penerimaan Pembiayaan	89.814	68.296	48.903	71.914	25.000
III.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	73.645	62.087	17.000	25.000	25.000

III.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
III.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
III.1.4	Penerimaan pinjaman daerah /obligasi daerah	14.083	6.210	31.902	46.914	-
III.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	5,883	-	-	-	-
III.1.6	Penerimaan piutang daerah	2.080	-	-	-	-
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.767	1.755	3.700	6.200	12.700
III.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
III.2.2	Penyertaan modal (Investasi daerah)	2.500	500	2.700	2.700	2.700
III.2.3	Pembayaran pokok utang	986	1.255	1.000	3.500	10.000
III.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-

BAB IV

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare tahun 2008 – 2013 telah memuat tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan ini disusun dengan memperhatikan seluruh potensi yang ada di Kota Parepare, memperhitungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Tujuan dan sasaran pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari visi dan misi. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Mendorong pertumbuhan dan memantapkan struktur ekonomi daerah	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)
		Mengurangi jumlah penduduk miskin	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan daerah
		Memberikan perlindungan kesejahteraan sosial	Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
2	Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Memperbaiki akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan derajat kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan
		Mendorong peningkatan apresiasi seni-budaya dan iptek	Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya dan IPTEK
		Mendorong prestasi kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga
3	Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota	Memantapkan fungsi sarana - prasarana transportasi dan perhubungan kota	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi kota dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik
		Memelihara kecukupan sarana-prasarana pemukiman dan tata air kota	Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman
			Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air bersih yang efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan
4	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Memantapkan kesadaran dan etika lingkungan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	Meningkatnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup

		Menekan dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan pembangunan dan masyarakat	Meningkatnya penanggulangan dampak lingkungan
		Merehabilitasi dan memelihara fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup
		Menata kebersihan dan keindahan kota	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota secara efektif, terpadu dan berkelanjutan
5	Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis	Memantapkan spiritualitas dan moralitas masyarakat	Meningkatnya Kehidupan spiritual-keagamaan
		Meningkatkan kemandirian masyarakat	Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat
		Meningkatkan kualitas dari teknostruktur masyarakat guna melahirkan produk unggulan berdasarkan potensi dan sumberdaya spesifik lokalitas	Meningkatnya inovasi masyarakat dalam menghasilkan produk unggulan sesuai potensi lokal dan peluang yang dapat dimanfaatkan
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memantapkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
		Memantapkan efektivitas organisasi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif	Terciptanya efektivitas bagi fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
		Memantapkan penerapan norma-norma pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.	Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit

1.2. Tema RKPD Tahun 2012

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2010 dan rencana pencapaian indikator kinerja tahun 2011, maka dirumuskan Tema RKPD Tahun 2012 adalah :

“ PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PADA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN”

Peningkatan kualitas layanan pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar merupakan perwujudan dari upaya Pemerintah Kota Parepare dalam pemenuhan terhadap sepuluh hak dasar meliputi : (1) ketersediaan pangan terjangkau; (2) layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas; (3) layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; (4) kesempatan kerja dan lapangan usaha; (5) layanan perumahan dan sanitasi; (6) akses air bersih; (7) kepastian pemilikan dan penguasaan tanah; (8) sumberdaya alam dan

lingkungan hidup; (9) rasa aman dan tenteram; (10) partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu didukung oleh upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Olehnya itu, di bidang ekonomi pemerintah daerah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Lingkungan merupakan bagian penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, sehingga paradigma baru memandang lingkungan bukan sekedar sebagai obyek pembangunan belaka melainkan bagian dari pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan olehnya itu pelestarian lingkungan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

1.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare tahun 2012 dirumuskan dengan mengacu pada sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 dan memperhatikan hasil pencapaian pada tahun 2010 serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi selama ini. Selain itu, untuk menjamin sinergitas antara prioritas pembangunan propinsi dan daerah maka prioritas pembangunan Kota Parepare tahun 2012 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah propinsi dan pusat.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2012, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta
12. Prioritas lainnya : (a) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (b) Bidang Perekonomian dan (c) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan pada tahun 2012, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan.
2. Peningkatan Produksi Pertanian, dan Perikanan serta pariwisata unggulan.
3. Pengembangan Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja.
5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan Tema RKPD Tahun 2012, Pemerintah Kota Parepare menetapkan prioritas pembangunan tahun 2012, adalah :

1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 telah menggambarkan bahwa peningkatan akses dan layanan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Untuk itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Pengembangan Pendidikan dan juga kesehatan merupakan salah satu aspek penekanan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan, kesetaraan gender, serta pemahaman nilai-nilai budaya.

Pemerataan akses pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga masyarakat secara merata mampu mendapatkan layanan pendidikan dasar yang murah dan berkualitas, khususnya dalam program wajib belajar dua belas tahun, selain itu pemerataan sebaran sarana dan prasarana pendidikan disemua tingkatan pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus. Kualitas dimaksud terkait dengan standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Sasaran pembangunan bidang pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian indikator kinerja tahun 2011, maka ditetapkan indikator sasaran pembangunan pendidikan tahun 2012, yaitu :

- a. Meningkatnya angka indeks pendidikan (mencapai 87,07 %)
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin pada :
 - 1) Peningkatan angka rata-rata lama sekolah mencapai 10 Tahun
 - 2) Angka partisipasi kasar
 - Tingkat SD/MI mencapai 117 %
 - Tingkat SMP mencapai 115%
 - Tingkat SMU/SMK mencapai 100%
- c. Meningkatnya mutu pendidikan dengan indikator peningkatan persentase kelulusan dalam pelaksanaan ujian nasional.

- Tingkat SD/MI mencapai 100%
- Tingkat SMP mencapai 98%
- Tingkat SMU/SMK mencapai 98%

Untuk mencapai sasaran ini, maka Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan akan melaksanakan program sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU)
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Luar Sekolah
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan diarahkan pada efektivitas penerapan paradigma sehat melalui upaya pengembangan lingkungan dan keluarga sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan pengobatan serta promosi kesehatan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penerapan pola hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

Seperti halnya bidang pendidikan, bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Adapun sasaran yang ingin dicapai bidang kesehatan tahun 2012, adalah :

- a. Meningkatnya angka Indeks Kesehatan mencapai 82,35%
- b. Meningkatnya Angka Harapan Hidup mencapai 75 tahun

Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini, adalah :

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- f. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- g. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

3. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi aspek penawaran dan permintaan tenaga

kerja, perencanaan ketenagakerjaan, dan informasi pasar kerja/pekerjaan. Semua aspek ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi kedepan karena tingkat kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja tersebut tidak hanya dilihat dari jumlahnya tetapi kualitas dan produktifitasnya, serta dukungan perbaikan terhadap iklim ketenagakerjaan yang semakin membaik.

Pemerintah Kota Parepare menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Menurunnya angka pengangguran terbuka dibawah 21 %
- b. Menurunkan angka penduduk miskin dibawah 9,5 %
- c. Merevitalisasi fungsi UPTD Kantor Latihan Kerja sebagai tempat pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja siap pakai
- d. Membangun kerjasama dengan dunia usaha untuk mengakses Informasi Pasar Tenaga Kerja.

Program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini meliputi :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

4. Peningkatan perekonomian daerah

Pengentasan kemiskinan masih merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Pemerintah Kota Parepare berupaya untuk mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis rumah tangga dan kelompok untuk mengurangi angka kemiskinan. Melalui pagu wilayah, telah diakomodir beberapa program/kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha rumah tangga dan kelompok dengan sasaran peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan petani dan nelayan juga akan memperoleh perhatian dari pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Menurunnya jumlah rumah tangga miskin
- b. Meningkatnya PDRB berdasarkan Harga berlaku mencapai Rp. 2.376.096.830.000 dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 878.324,83
- c. Meningkatnya indeks paritas daya beli perbulan mencapai Rp. 700.000

Program pembangunan yang akan dilakukan adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- b. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Pengembangan IKM
- e. Program Penataan struktur Industri
- f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM

- g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
- h. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah
- i. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- j. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
- k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna
- l. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- m. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- n. Program pengembangan perikanan tangkap
- o. Program pengembangan budidaya perikanan

5. Pengembangan Infrastruktur Daerah

Pengembangan infrastruktur daerah diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan perekonomian. Pengembangan infrastruktur daerah meliputi : (i) **Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi**. Pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana transportasi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas jalan dan jembatan guna menunjang perekonomian daerah dan kemajuan kota; (ii) **Pemeliharaan dan Pengembangan Tata Air Kota dan Permukiman**, diarahkan pada upaya penciptaan lingkungan permukiman dan kota yang bebas banjir secara berkelanjutan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat; (iii) **Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Pertumbuhan**, Penataan sarana-prasarana kawasan pertumbuhan diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan bagi investasi pengusaha pada kawasan industri (KIPAS) serta sarana-prasarana lainnya dalam kota.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 100 %
- b. Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih yang menjangkau 70 % Penduduk
- c. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi untuk pertanian mencapai 100 %
- d. Rumah tangga bersanitasi mencapai 88 %
- e. Berkurangnya lingkungan perumahan kumuh hingga di bawah 9 %
- f. Rasio bangunan ber-IMB mencapai 20%
- g. Peningkatan pengelolaan Kawasan Industri Parepare (KIPAS)

Untuk mencapai sasaran ini, maka akan dilaksanakan beberapa program pembangunan, antara lain :

- a. Program Pembangunan jalan dan jembatan
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- d. Program Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- f. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah/Sanitasi
- h. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- i. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- j. Penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan angkutan
- k. Pengawasan kelaikan kendaraan bermotor
- l. Pengembangan perumahan dan permukiman
- m. Penataan, pengembangan dan pemeliharaan lampu jalan umum.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu komponen visi Kota Parepare lima tahun kedepan, yakni masyarakat yang berkomitmen lingkungan. Urgensinya juga terkait dengan kecenderungan global atas perubahan iklim yang berlangsung cepat dan sulit terprediksi. Kebijakan ini terkait dengan upaya untuk menjamin keberlanjutan dari daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat dalam arti luas. Selain itu, pelestarian lingkungan hidup juga mencakup upaya pemeliharaan kebersihan dan keindahan kota serta upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim global.

Agar pelestarian lingkungan dapat berjalan optimal maka perlu pemantapan kesadaran dan etika lingkungan masyarakat yang diarahkan pada semakin berkembangnya pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang berbasis pada kearifan dan prakarsa lokalitas. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah pengembangan ruang terbuka hijau, penataan kebersihan dan keindahan kota, dan penanggulangan dampak lingkungan.

Sasaran yang akan dicapai untuk prioritas pembangunan ini, adalah :

- a. Terwujudnya ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah Kota Parepare
- b. Dipertahankannya Piala Adipura untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut
- c. Pengembangan pengelolaan Hutan Jompie sebagai Kebun Raya Parepare
- d. Polusi udara, limbah padat dan limbah cair terkendalikan pada tingkat yang dapat ditoleransi bagi kesehatan, kebersihan dan keindahan kota.
- e. Terimplementasikannya Parepare *Evergreen City* dalam bentuk *green-office* (penghijauan halaman kantor), dan *green-school* (penghijauan halaman sekolah) mencapai 100 %.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Untuk merealisasikan sasaran pembangunan tersebut maka telah ditetapkan program-program prioritas, sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- b. Program Pengendalian & Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- g. Program Penataan Ruang Terbuka Hijau
- h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- i. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

BAB V

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 merupakan implementasi dari RPJMD Kota Parepare Tahun 2012, yang bertujuan untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. RKPD ini telah disusun secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholders perencanaan pembangunan di Kota Parepare, dan memperhatikan sinergitas antara program prioritas pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada RKPD Kota Parepare Tahun 2012.

Dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2012, telah ditetapkan pagu wilayah kecamatan yang bertujuan untuk mengakomodir seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sepanjang usulan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat. Anggaran yang disiapkan untuk pagu wilayah kecamatan maksimal Rp. 47.000.000.000. Usulan program/kegiatan yang merupakan bagian dari pagu wilayah kecamatan akan terus dicermati dan memungkinkan mengalami perubahan pada tahapan perencanaan dan penganggaran selanjutnya (PPAS, RKA – SKPD dan RAPBD) agar tidak bertentangan peraturan pengelolaan keuangan daerah serta pedoman penyusunan APBD tahun 2012.

Pemerintah Daerah Kota Parepare bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare berkewajiban menjaga konsistensi RKPD Tahun 2012 dengan pelaksanaan APBD Tahun 2012. Diharapkan semua program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD dapat diakomodir dalam APBD Kota Parepare Tahun 2012 dan perlu mempertimbangkan untuk tidak mengakomodir usulan program/kegiatan yang tidak tertuang dalam RKPD. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala